

DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL PASCA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DI KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Imelda Hutasoit¹, Nur Handayani², Anya Risnawati³, Muh. Ilham⁴, Stenly Pangarepan⁵, Mohamad Saputra Tambora⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

E-mail: imeldahutasoit@ipdn.ac.id¹; nur_handayani@ipdn.ac.id²; anvarisnawati@gmail.com³;
muh.ilham@ipdn.ac.id⁴; stenly@ipdn.ac.id⁵; saputrawalker@ipdn.com⁶

ABSTRAK. Relokasi IKN bertujuan pemerataan dan keberlanjutan, namun berpotensi berdampak pada lingkungan dan masyarakat adat. Ada peluang investasi di wilayah penyangga seperti Tabalong. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dampak perubahan sosial pasca pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan mengungkap faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambatnya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial. Ditinjau dari teori perubahan sosial Sztompka menunjukkan bahwa: (1) Perubahan komposisi penduduk menunjukkan peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi, terutama dari Jawa, telah mengubah komposisi penduduk Tabalong. Hal ini memicu persaingan kerja, masalah pangan, dan potensi konflik sosial. Namun, filosofi Banjar yang terbuka terhadap pendatang membantu meminimalkan konflik. (2) Perubahan struktur sosial terjadi pergeseran sektor ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi telah mengubah struktur sosial dan ekonomi di Tabalong. Namun, masih terdapat ketimpangan dalam hal akses terhadap pekerjaan dan sumber daya. (3) Perubahan fungsi lahan menunjukkan Tabalong telah berhasil mengubah fungsi lahan pertanian menjadi kawasan produksi pangan untuk IKN. Pasar Agribisnis Kembang Kuning menjadi pusat distribusi utama. Namun, tantangan dalam menjaga kualitas produk dan akses pasar tetap ada. (4) Perubahan batas sosial terjadi perubahan batas sosial akibat masuknya pendatang baru dan persaingan kerja. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini dengan pelatihan keterampilan dan revisi RTRW. (5) Perubahan hubungan antar subsistem terjadi peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, perubahan hubungan antara petani dan pasar, serta peningkatan ketergantungan pada pasar eksternal dan (6) Perubahan lingkungan dimana pembangunan IKN telah memicu perubahan tata guna lahan, peningkatan tekanan pada sumber daya alam, dan potensi konflik lingkungan. Adapun faktor pendorongnya adalah adanya potensi sumber daya alam yang besar, letak geografis yang strategis, keterbukaan masyarakat terhadap pendatang, dan tingginya investasi. Namun demikian, terdapat faktor penghambat seperti kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, infrastruktur yang belum memadai, dan akses pasar yang terbatas. Penting untuk digarisnawahi bahwa dampak pembangunan IKN terhadap perubahan sosial di Tabalong bersifat kompleks dan beragam, bergantung pada berbagai faktor, seperti: 1) Kebijakan pemerintah dalam mengelola pembangunan IKN; 2) Kesiapan masyarakat Tabalong dalam beradaptasi dengan perubahan; dan 3) Dinamika interaksi antara penduduk lokal dan pendatang.

Kata Kunci: perubahan sosial, Tabalong, dampak IKN

IMPACT OF SOCIAL CHANGES POST CONSTRUCTION OF THE NUSANTARA CAPITAL CITY IN TABALONG DISTRICT, SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

ABSTRACT. IKN relocation aims at equity and sustainability, but has the potential to impact the environment and indigenous communities. There are investment opportunities in buffer areas such as Tabalong. This research aims to describe the impact of social change after the development of the Indonesian Capital City (IKN) in Tabalong Regency, South Kalimantan Province and reveal what factors are driving and inhibiting it. Using descriptive qualitative methods, primary data was obtained through in-depth interviews with various relevant key informants, while secondary data was obtained from document studies. Data analysis was carried out to identify and explain the factors that drive and inhibit social change. Judging from Sztompka's theory of social change, it shows that: (1) Changes in population composition show that the increase in population due to migration, especially from Java, has changed the composition of the Tabalong population. This triggers job competition, food problems and potential social conflict. However, Banjar's philosophy of being open to immigrants helps minimize conflict. (2) Changes in social structure have seen a shift in the economic sector from agriculture to industry and services. Infrastructure development and increased investment have changed the social and economic structure in Tabalong. However, there is still inequality in terms of access to jobs and resources. (3) Change in land function shows that Tabalong has succeeded in changing the function of agricultural land into a food production area for IKN. The Kembang Kuning Agribusiness Market is

the main distribution center. However, challenges in maintaining product quality and market access remain. (4) Changes in social boundaries. There are changes in social boundaries due to the entry of new immigrants and job competition. The government is trying to overcome this with skills training and revision of the RTRW. (5) Changes in relations between sub-systems have resulted in increased coordination between government agencies, changes in relations between farmers and markets, as well as increased dependence on external markets and (6) environmental changes where IKN development has triggered changes in land use, increased pressure on natural resources, and potential environmental conflicts. The driving factors are the large natural resource potential, strategic geographical location, community openness to immigrants, and high investment. However, there are inhibiting factors such as the quality of human resources which still needs to be improved, inadequate infrastructure, and limited market access. It is important to emphasize that the impact of IKN development on social change in Tabalong is complex and varied, depending on various factors, such as: 1) Government policy in managing IKN development; 2) Readiness of the Tabalong community to adapt to change; and 3) Dynamics of interactions between local residents and immigrants.

Keywords: *social changes, Tabalong, impact of IKN*

PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan di Indonesia dengan konsep kota yang *smart, green, beautiful, sustainable*, dan berwawasan lingkungan yang dikomunikasikan secara nasional dari hulu hingga hilir dengan mempertimbangkan ekonomi komersial dan finansial. Banyak sorotan yang mengkhawatirkan melemahnya ekosistem alami akibat modernisasi dan kemajuan teknologi memberi referensi dan dorongan kuat kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan tepat guna dalam aktivitas pembangunan yang menerapkan konsep *Forest City* di kota-kota dunia.

Menurut Mahyudin (Kompas TV, 2022) Undang-Undang IKN belum menyentuh wilayah penyangga dan hanya fokus pada wilayah pusat IKN. Padahal berbagai sarana penunjang untuk menyangga IKN harus dibenahi. Beberapa kawasan penyangga IKN masih belum memiliki sarana yang optimal khususnya kualitas jalan lintas daerah.

Pembangunan IKN memiliki sejumlah potensi masalah yang kompleks terutama keberlangsungan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Sebagai pengganti Jakarta sudah pasti akan menjadi mercusuar strategis yang terus tumbuh dan berkembang menjadi kota metropolitan dalam rangka mewadahi kebutuhan tiap-tiap daerah penyangga serta mendorong percepatan pertumbuhan kota-kota sekitar (Prianggodo, 2023). Tantangan besar tidak hanya dalam hal infrastruktur fisik, tetapi juga dalam penataan masyarakat. Hal ini menjadi krusial karena IKN akan menjadi rumah bagi berbagai komunitas, baik masyarakat lokal yang telah lama tinggal di wilayah tersebut maupun pendatang baru (Sembiring, 2022).

Dampak kompleks bagi masyarakat adat di sekitarnya, penetrasi budaya luar dan intervensi pemerintah, jika tidak dikelola dengan baik, dapat melemahkan ketahanan budaya, memperburuk kondisi ekonomi, dan memicu konflik sosial. Dampak pada pembangunan IKN dapat ditunjukkan dengan adanya ancaman resiko bencana dan penambahan penduduk serta pergeseran budaya lama ke budaya yang baru dan lebih modern (Putri et al., 2024). Dampak yang luar biasa khususnya dalam membuka lapangan kerja. Jutaan tenaga kerja akan terserap di berbagai sektor selain pendatang juga warga lokal yang mempunyai keterampilan (Maheswani, 2023).

Namun pembangunan Ibu Kota Nusantara, di Kalimantan menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan perubahan penggunaan lahan (Putra et al., 2023). Proyek berskala besar membutuhkan sekitar 256.142 hektar lahan, yang berpotensi mempengaruhi wilayah masyarakat adat dan Hukum Adat (Firnaherera & Lazuardi, 2022). Sementara Undang-Undang IKN belum mengatur konflik pertanahan atau konflik dengan masyarakat adat yang ada di sekitar IKN, namun justru perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat tercabut. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 42 Undang-Undang IKN yang

menyatakan bahwa “Seluruh peraturan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku di wilayah IKN.” Artinya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur tidak berlaku lagi.

Meski demikian pemerintah Kalimantan Selatan berkomitmen menopang suksesnya IKN yang menjadi pintu gerbang menuju IKN. Maka dari itu perlu langkah-langkah menyelesaikan Undang-Undang masyarakat adat, mengakui hak-hak masyarakat adat, dan menyediakan mata pencaharian alternatif (Firnaherera & Lazuardi, 2022).

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur berdampak positif terhadap investasi di Kabupaten Tabalong, Peluang investasi yang signifikan di Kabupaten Tabalong karena Lokasi strategis, potensi ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur yang tinggi menjadi faktor pendorong utama. Investasi di bidang *Real Asset*, seperti tanah dan bangunan, yang banyak diminati investor (Wulandari et al., 2023). Demikian halnya di Kalimantan Timur. *Dari tahun 2021 sampai Maret 2024 investasi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan. Investasi IKN tumbuh dari tahun ke tahun, terutama tahun 2023 mencapai Rp. 47,5 triliun, target investasi 100 triliun pada tahun 2024 dengan menggandeng Indonesia Investment Authority untuk mempercepat pertumbuhan investasi. Banyaknya investasi yang masuk dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat*

Kebaruan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus perubahan sosial di wilayah penyangga yaitu Kabupaten Tabalong yang bukan hanya aspek ekonomi atau lingkungan namun lebih holistik tentang dampak IKN pada masyarakat. Penelitian ini menyoroti dampak pada wilayah yang tidak langsung terlibat dalam pembangunan fisik IKN, memberikan perspektif yang berbeda dari penelitian yang berfokus pada wilayah inti. Fokus pada smart port" di IKN yang mengkaji penerapan teknologi di infrastruktur IKN; (Prianggodo, 2023) fokus pada pembangunan IKN sebagai mercusuar strategis dari perspektif pembangunan berkelanjutan (Wulandari et al., 2023) fokus pada pengaruh pemindahan IKN terhadap investasi di Kabupaten Tabalong; (Sembiring, 2022) fokus pada analisis sosio-demografi untuk perencanaan IKN yang "*smart, green, beautiful, and sustainable*"; (Ripaldi et al., 2022) fokus pada kesiapan masyarakat Dayak Deah di Desa Kinarum dalam menyambut IKN; (B et al., 2022) fokus pada Dampak IKN terhadap pembangunan sosio-ekonomi di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara. (Firnaherera & Lazuardi, 2022) fokus pada antisipasi persoalan pertanahan masyarakat hukum adat. (Fadillah, 2022) fokus pada tinjauan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam UU IKN. (Puspitaningrum et al., 2023) focus pada pemindahan IKN: pembangunan kota inklusif dan berkelanjutan. (Putri et al., 2024) fokus pada analisis dampak pembangunan IKN terhadap potensi pertumbuhan investasi domestik dan asing.

Berdasarkan latar belakang dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana dampak perubahan social pasca pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan? dan 2) Apa faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial dampak pembanguan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan?

KERANGKA PEMIKIRAN

Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah ibu kota masa depan Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Kalimantan. Dibangun dan direncanakan akan menggantikan Ibu Kota Negara Jakarta. Kabupaten Tabalong sebagai daerah penyangga akan terdampak pada perubahan sosial akibat pembangunan IKN. Hal tersebut dikarenakan Kalimantan Selatan merupakan gerbang utama lalu lintas dan daerah penyangga yang menghubungkan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Harapannya dapat mendorong

DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL PASCA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DI KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

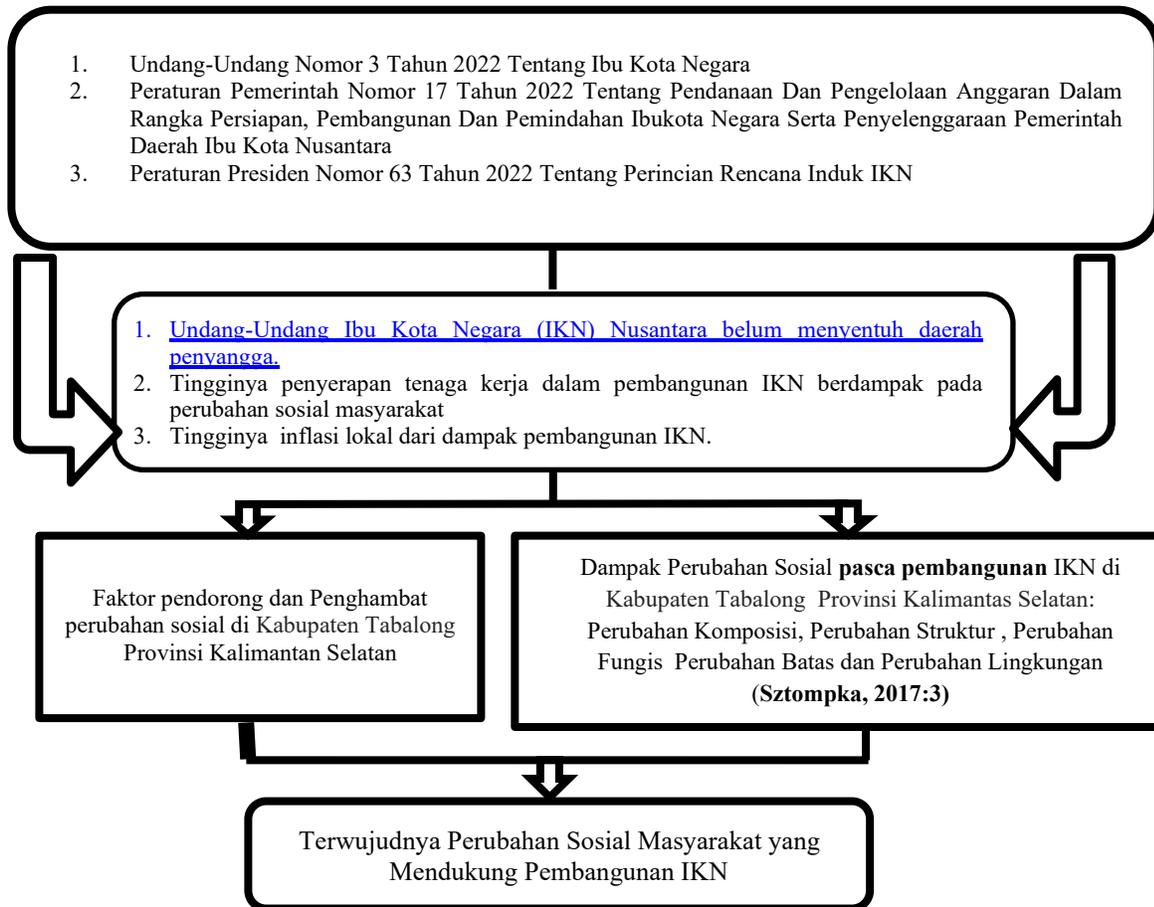
Imelda Hutasoit, Nur Handayani, Anya Risnawati, Muh. Itham, Stenly Pangarepan, Mohamad Saputra Tambora

perubahan sosial ekonomi yang signifikan di wilayah sekitarnya. Program ini bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan berfungsi sebagai mercusuar strategis bagi pertumbuhan (Prianggodo, 2023).

Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai potensi dampak lingkungan dan penggusuran masyarakat adat (Fadillah, 2022) Proyek IKN dibayangkan sebagai kota inklusif dan berkelanjutan yang menumbuhkan kohesi sosial dan mewakili kemajuan nasional (Puspitaningrum et al., 2023). Harapannya dapat merangsang kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur, mendorong perdagangan antar daerah, dan menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek (B et al., 2022).

Persoalan tanah ulayat dari masyarakat adat yang tidak bersertifikat terancam. Rendahnya ganti rugi tanah. Banyaknya para pendatang ke wilayah Kalimantan Timur maupun Kalimantan Selatan sebagai daerah penyangga dari adanya penetapan Ibu Kota Negara (IKN) baru dapat mengakselerasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar IKN sehingga memberikan *trickle down effect* bagi daerah penyangga. Hal tersebut memudahkan pemerintah daerah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat daerahnya dengan berpartisipasi dan mendukung Ibu Kota Negara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Teori perubahan sosial (Piotr Sztompka, 2017 : 8) menegaskan bahwa perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatan: sudut aspek, *fragmen* atau dimensi sistem sosialnya. Ini disebabkan keadaan sistem sosial itu tidak sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai komponen. Bila dipisah-pisah menjadi komponen dan dimensi utamanya, teori sistem secara tidak langsung (Piotr Sztompka, 2017 : 5) menyatakan kemungkinan perubahan yaitu perubahan komposisi, perubahan struktur, perubahan fungsi, perubahan batas, perubahan hubungan antarsubsystem dan perubahan lingkungan. Kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk menganalisis perubahan sosial dan faktor-faktornya di Kabupaten Tabalong (daerah penyangga IKN). Data dikumpulkan dari informan (*purposive & snowball sampling*) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model Spradley.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Perubahan Sosial Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil penelitian ini ditinjau dari teori perubahan sosial (Piotr Sztompka, 2017) yang terdiri dari dimensi perubahan komposisi, perubahan struktur, perubahan fungsi, perubahan batas, Perubahan hubungan antar subsistem dan perubahan lingkungan.

A. Perubahan Komposisi Penduduk

Kalimantan Selatan menjadi provinsi penting dan strategis karena posisinya paling dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL PASCA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DI KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Imelda Hutasoit, Nur Handayani, Anya Risnawati, Muh. Ilham, Stenly Pangarepan, Mohamad Saputra Tambora

mendorong kabupaten-kabupaten di wilayahnya untuk mengembangkan potensi ekonomi dan berinovasi. Kedekatannya dengan IKN menjadi keuntungan besar bagi Kalimantan Selatan, karena IKN dapat menjadi pasar yang besar bagi produk dan jasa dari Kalimantan Selatan. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, Kalimantan Selatan dapat menjadi gerbang IKN dan maju serta sejahtera. Hal ini membuka peluang besar bagi kemajuan ekonomi di Kalimantan Selatan dimana “Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan terhadap wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Tabalong (Ripaldi et al., 2022)”.

Kabupaten Tabalong, sebagai Gerbang Utama Kalimantan Selatan, merasakan dampak besar dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Kedekatannya dengan IKN (hanya 3-4 jam perjalanan darat) menjadikan Tabalong sebagai daerah yang paling terdampak (Wulandari et al., 2023). Relokasi telah mempengaruhi investasi di Tabalong, dan aset riil menjadi perhatian khusus.

Sebelum IKN diresmikan, Tabalong sudah mempersiapkan diri sebagai serambi depan Kalimantan Selatan di wilayah utara. Namun, dengan UU IKN, Tabalong, terutama Kecamatan Jaro (2,5 jam perjalanan darat/2 jam naik motor ke IKN), menjadi wilayah penyelenggara IKN. Kedekatan Tabalong dengan IKN (sekitar 3-4 jam perjalanan darat) memicu migrasi penduduk, terutama pencari kerja dari Jawa. Hal ini menimbulkan beberapa masalah sosial di antaranya adalah:

- 1) Peningkatan Penduduk disebabkan migran yang tidak diterima di IKN menetap di Tabalong, menyebabkan lonjakan penduduk. Hal tersebut meningkatnya kebutuhan akan perumahan, air bersih, dan infrastruktur lainnya.
- 2) Persaingan Tenaga Kerja disebkan penduduk lokal harus bersaing dengan pendatang untuk mendapatkan pekerjaan. Dampaknya potensi terjadinya eksploitasi tenaga kerja murah.
- 3) Masalah Ketenagakerjaan disebabkan migran yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Tabalong. Berakibat pada meningkatnya pengangguran di kalangan penduduk lokal.
- 4) Masalah Pangan disebabkan adanya peningkatan permintaan pangan tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. dampaknya kemungkinan terjadi inflasi harga pangan.
- 5) Dampak Industri disebabkan oleh meningkatnya permintaan industri terhadap bahan baku dan sumber daya alam. Akibatnya berpotensi kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan memiliki pola migrasi yang unik. Mayoritas pendatang berasal dari Pulau Jawa, namun hal ini tidak memicu konflik sosial. Filosofi Banjar "asal jangan piring diambil" menjadi kuncinya. Selama penduduk lokal tidak dirugikan, migran diterima dengan tangan terbuka. Keterbukaan ini terlihat dari simbol-simbol di rumah adat dan bandara yang menunjukkan sambutan hangat bagi pendatang. Konflik, baru terjadi jika hak-hak mereka dilanggar. Kasus Sampit menjadi contoh konflik antar suku, bukan karena migrasi. Secara keseluruhan, migrasi di Kabupaten Tabalong menunjukkan pola yang terbuka dan harmonis.

Tingginya migran dapat memicu perubahan sosial akibat asimilasi budaya. Konflik biasanya terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, seperti di Tabalong, karena wanprestasi atau kurangnya keterbukaan perusahaan. Migrasi ke Banjarbaru dan Tabalong sudah terjadi, dan perpindahan penduduk besar akan terjadi saat IKN selesai, dengan perkiraan 60.000 ASN pindah ke IKN.

Pemerintah daerah Banjarbaru (Ibukota) dan Tabalong (Gerbang Utama IKN) telah mempersiapkan diri dengan menyediakan kawasan permukiman, pangan, dan infrastruktur, terutama jalur menuju IKN. Persiapan ini dilakukan di Benua Enam dan kawasan pesisir, karena Kalimantan Selatan merupakan jalur strategis transportasi yang berbatasan dengan IKN dan lumbung pangan nasional. Perubahan di Tabalong akibat migrasi tidak mencakup semua indikator Sztompka. Satu-satunya indikator yang terlihat adalah terbentuknya kelompok-kelompok baru.

B. Perubahan Struktur Sosial

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur membawa dampak positif, namun juga menimbulkan ketimpangan dalam ketenagakerjaan. Persaingan SDM menjadi fokus utama, karena Kalimantan Selatan sebagai gerbang IKN akan didatangi banyak tenaga kerja dari Jawa.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyadari hal ini dan berupaya menyiapkan tenaga kerja lokal agar dapat bersaing. Saat ini, banyak pekerjaan di IKN, dari buruh kasar hingga insinyur, didominasi oleh orang Jawa. Orang Kalimantan Selatan masih tertinggal dan belum bisa berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, pemerintah provinsi memiliki pekerjaan rumah untuk mempersiapkan SDM lokal agar dapat bekerja di IKN di masa depan. Diharapkan nantinya, penduduk Kalimantan Selatan dapat mengisi berbagai posisi di IKN dan dapat berkolaborasi dengan mudah.

Kabupaten Tabalong siap menyambut peluang investasi dan perubahan sosial akibat pembangunan IKN. Potensi daerah dan kesiapan pemerintah menjadi daya tarik bagi investor. Salah satu rencana untuk meningkatkan akses adalah pembangunan lapangan terbang di Tabalong. Hal ini menunjukkan kesiapan Pemkab Tabalong dalam menghadapi perubahan sosial akibat pembangunan IKN.

Pembangunan IKN membawa peluang bagi Tabalong, dengan investor asing yang datang. Hal ini dapat memicu persaingan dengan investor lokal, namun pemerintah setempat terbuka untuk investasi yang dapat meningkatkan pembangunan dan ekonomi. Meskipun kaya sumber daya alam, Tabalong sempat mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari peringkat 9 ke 10. Namun, IPM Tabalong menunjukkan peningkatan sejak 2019, yaitu 71,78 di tahun 2020 dan 72,19 di tahun 2021. Peningkatan IPM ini menunjukkan komitmen Pemkab Tabalong untuk menjadi yang terdepan dalam menyambut IKN. Tabalong sebagai "serambi depan IKN" siap menghadapi berbagai peluang dan tantangan. Bahkan tidak hanya siap menyambut peluang IKN, tapi juga siap menjadi bagian penting dalam pembangunan IKN dengan langkah strategis di berbagai sektor di antaranya adalah:

- 1) Kawasan industri seluas 3.200 hektare disiapkan.
- 2) Konsep smart industrial park diterapkan.
- 3) Slogan "Jangan Jadi Penonton, Tapi Harus Jadi Pemain" menjadi semangat utama.
- 4) Terjalinnnya kerjasama dan hubungan antar pihak.

Jika ditinjau dari teori perubahan sosial Sztompka yang menyatakan perubahan sosial adalah proses transformasi dalam struktur sosial suatu masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perubahan teknologi, ekonomi, politik, atau budaya. Struktur sosial yang dimaksud mencakup sistem sosial, lembaga sosial, peran sosial, dan stratifikasi sosial. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur telah memicu perubahan struktur sosial yang signifikan di Kabupaten Tabalong. Beberapa perubahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

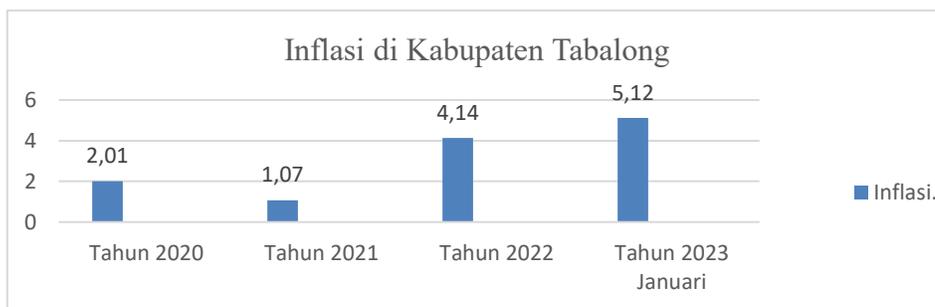
- 1) Perubahan Struktur Ekonomi:
 - a. Pergeseran Sektor Ekonomi: Terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, terutama yang terkait dengan pembangunan IKN.
 - b. Pertumbuhan Ekonomi: Pembangunan IKN berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong, namun juga dapat memperbesar kesenjangan sosial.
 - c. Perubahan Pola Konsumsi: Meningkatnya pendapatan masyarakat dapat mengubah pola konsumsi dan gaya hidup.
- 2) Perubahan Struktur Sosial:
 - a. Migrasi Penduduk: Pembangunan IKN akan menarik migrasi penduduk dari daerah lain, terutama tenaga kerja. Hal ini dapat mengubah komposisi penduduk dan dinamika sosial di Kabupaten Tabalong.

- b. Perubahan Peran Gender: Perempuan mungkin akan memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan, namun juga menghadapi tantangan baru seperti beban kerja ganda.
 - c. Munculnya Kelas Menengah Baru: Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kelas menengah baru yang memiliki gaya hidup dan nilai-nilai yang berbeda.
- 3) Perubahan Struktur Politik:
- a. Peningkatan Partisipasi Politik: Masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi dalam politik, terutama dalam menyuarakan aspirasi terkait pembangunan.
 - b. Perubahan Kebijakan Publik: Pemerintah daerah akan membuat kebijakan baru untuk mendukung pembangunan dan mengatasi permasalahan sosial yang muncul.
- 4) Perubahan Budaya:
- a. Akulturasi Budaya: Interaksi dengan pendatang baru akan memperkaya budaya lokal, namun juga dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya.
 - b. Modernisasi: Masyarakat akan semakin terbuka terhadap perubahan dan inovasi.

Perubahan struktur sosial di Kabupaten Tabalong memiliki implikasi positif maupun negatif. Positifnya adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, pengembangan infrastruktur dan terbukanya peluang kerja. Implikasi negatifnya adanya ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, konflik sosial dan hilangnya identitas budaya.

C. Perubahan Fungsi melalui Adaptasi dan Transformasi

Tabalong memanfaatkan peluang IKN dengan memaksimalkan potensi daerahnya, terutama di sektor pertanian. Hal ini membawa dampak positif bagi ekonomi dan stabilitas pangan di Tabalong dan sekitarnya. Dampak positifnya adalah (1) perekonomian dan pendidikan di Tabalong mengalami kemajuan; (2) Pembangunan infrastruktur di Tabalong dipercepat. Hal tersebut didukung adanya potensi dan upaya yang dimiliki Kabupaten Tabalong diantaranya: (1) Tabalong memiliki potensi di sektor perkebunan dan pertambangan. (2) Sebelumnya, Tabalong mengalami kekurangan pangan dan harus membantu Kalteng dan Kaltim, dengan inflasi mencapai 9%. (3) Sejak 2014, Tabalong fokus pada pembangunan sektor pertanian pangan, belajar dari Barito Kuala dan Hulu Sungai Selatan. (4) Hasilnya, Tabalong mencapai swasembada pangan dan surplus, bahkan membantu daerah lain dan termasuk kelompok dengan inflasi rendah di Indonesia.



Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2023

Upaya tersebut, menunjukkan kesiapan Tabalong untuk menjadi lumbung pangan IKN dan mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Kesiapan Tabalong yaitu siap menjadi outlet lumbung pangan IKN dengan menyediakan Pasar Agribisnis Kembang Kuning, Kecamatan Haruai. Pasar tersebut strategis karena terletak di jalan provinsi menuju IKN. Berbagai upaya dilakukan seperti:

- 1) Upaya Memacu Ekonomi Daerah yang ditunjukkan dengan:
 - a. Pada 22 Juni 2023, Tabalong secara simbolis menandai diri sebagai daerah penghasil dan pengirim produk hortikultura ke IKN.
 - b. Seremoni pengiriman berlangsung di Pasar Agribisnis Desa Kembang Kuning, Kecamatan Haruai. Pasar ini disiapkan menjadi outlet pangan Kalimantan Selatan untuk IKN.
- 2) Program Kampung Hortikultura ditunjukkan dengan:
 - a. Sejak 2022, Pemkab Tabalong mengembangkan Program Kampung Hortikultura dengan target 10 lokasi.
 - b. Pada 2023, lima desa akan dikembangkan, yaitu Desa Saradang, Bongkang, Nawin, Hayup, dan Wirang.
 - c. Lima desa lainnya telah menerima bantuan benih, pupuk, dan perlengkapan pertanian pada tahun sebelumnya.

Tabalong proaktif dalam mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan pangan IKN dan mengembangkan pasar agribisnis. Saat ini, Tabalong mampu menyediakan 125.000 ton pangan dari kebutuhan pangan IKN yang diperkirakan mencapai 300.000 ton. Harapannya bermanfaat ekonomi bagi masyarakat Tabalong dan Kalsel secara keseluruhan. Meskipun ada investor asing yang ingin memajukan sektor agribisnis, persaingan diharapkan mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk.

Jika dianalisis dengan pandangan Sztompka berdasarkan perspektif perubahan fungsi bahwa pembangunan IKN telah memicu perubahan fungsi dalam sektor pertanian di Kabupaten Tabalong di antaranya adalah:

- 1) Perubahan Fungsi Lahan:
 - a. Dari Subsisten ke Komersial: Lahan pertanian di Tabalong awalnya mungkin lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan lokal. Namun, dengan adanya permintaan dari IKN, fungsi lahan bergeser menjadi produksi komoditas untuk pasar yang lebih luas.
 - b. Dari Tradisional ke Modern: Penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern, seperti program Kampung Hortikultura, menunjukkan pergeseran dari praktik pertanian tradisional menuju pertanian yang lebih berbasis ilmu pengetahuan.
- 2) Perubahan Fungsi Pasar:
 - a. Dari Lokal ke Regional: Pasar Agribisnis Kembang Kuning awalnya mungkin berfungsi sebagai pusat distribusi untuk wilayah lokal. Namun, dengan adanya IKN, pasar ini kini berfungsi sebagai penghubung antara produsen lokal dengan pasar regional yang lebih besar.
 - b. Dari Konsumsi ke Produksi: Pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan produk pertanian, tetapi juga sebagai pusat informasi dan inovasi untuk meningkatkan produksi.
- 3) Perubahan Fungsi Pemerintah:
 - a. Dari Regulator ke Fasilitator: Pemerintah Kabupaten Tabalong tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam pengembangan sektor pertanian. Hal ini terlihat dari berbagai program dan dukungan yang diberikan kepada petani.
 - b. Dari Lokal ke Nasional: Pemerintah daerah kini memiliki peran yang lebih besar dalam konteks pembangunan nasional, yaitu sebagai penyedia pangan bagi IKN.

Implikasi dari Perubahan Fungsi ini adalah:

- 1) Peningkatan Kesejahteraan: Perubahan fungsi ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani di Tabalong melalui peningkatan pendapatan dan akses ke pasar yang lebih luas.
- 2) Perubahan Struktur Sosial: Perubahan dalam sektor pertanian dapat memicu perubahan dalam struktur sosial masyarakat, misalnya dengan munculnya kelompok petani yang lebih modern dan berorientasi pasar.

DAMPAK PERUBAHAN SOSIAL PASCA PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DI KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Imelda Hutasoit, Nur Handayani, Anya Risnawati, Muh. Itham, Stenly Pangarepan, Mohamad Saputra Tambora

- 3) Tantangan Adaptasi: Petani perlu beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar, teknologi pertanian, dan kebijakan pemerintah.
- 4) Ketergantungan pada Pasar Eksternal: Ketergantungan pada pasar IKN dapat membuat Tabalong rentan terhadap fluktuasi permintaan.

D. Perubahan Batas Sosial

Mengacu pada pandangan Sztompka (2017), perubahan batas sosial dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk transformasi sosial yang ditandai dengan dinamika relasi antarkelompok. Perubahan ini bisa berupa integrasi, dominasi, perubahan dalam mekanisme keanggotaan, atau bentuk-bentuk perubahan batas lainnya.

Adanya pembangunan IKN telah menarik banyak pendatang yang mencari pekerjaan di Kabupaten Tabalong. Hal ini menyebabkan persaingan kerja yang ketat bagi warga setempat. Sayangnya, banyak warga lokal yang belum memiliki keterampilan yang sesuai. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Tabalong berupaya mengatasi masalah tersebut dengan membekali warga dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, sehingga mereka dapat bersaing dengan para pendatang.

Langkah yang diambil adalah meningkatkan potensi dengan melakukan *mapping* bersama Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan keterampilan bagi penduduk Tabalong agar mampu bersaing dengan pekerja dari luar Tabalong. Mereka juga telah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan bagi 10 orang sebagai langkah awal. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan yang dimiliki penduduk Tabalong dengan kebutuhan lapangan kerja. Artinya telah terjadi perubahan batas dalam bentuk hadirnya kelompok pekerja baru di Kabupaten Tabalong, yang mungkin juga diikuti oleh penggabungan beberapa kelompok dalam kelompok pekerja baru tersebut.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Tabalong menginformasikan bahwa revisi RTRW dilakukan sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan, bandara baru, dan Kawasan Saradang. Peningkatan investasi yang signifikan di wilayah ini telah mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menyesuaikan program pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi gesekan sosial antara pekerja lokal dan pendatang. Selain itu, pemerintah daerah juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk NGO, untuk memberikan pelatihan bagi pencari kerja melalui program CSR. Kolaborasi multi *stakeholder* tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah. Dalam kasus ini jika mengacu perubahan batas sosial menurut Sztompka terjadi adanya:

- 1) Penggabungan Kelompok:
Pembangunan infrastruktur baru seperti bandara dan kawasan industri menarik masuknya investor dan tenaga kerja dari berbagai daerah. Hal ini mengakibatkan penggabungan antara penduduk lokal dengan pendatang baru, membentuk kelompok sosial yang lebih heterogen.
- 2) Pelonggaran Kriteria Keanggotaan:
Dengan adanya peluang kerja baru, kriteria untuk menjadi bagian dari kelompok pekerja di Kabupaten Tabalong menjadi lebih fleksibel. Tidak hanya penduduk lokal, tetapi juga pendatang dari daerah lain memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja.
- 3) Demokratisasi Keanggotaan:
Upaya pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat, baik lokal maupun pendatang, menunjukkan adanya upaya untuk mendemokratisasi akses terhadap sumber daya dan peluang. Hal ini menciptakan lapangan yang lebih setara bagi semua anggota masyarakat.

4) Perubahan Batas Lainnya:

Revisi RTRW merupakan bentuk perubahan batas spasial yang signifikan. Perubahan tata ruang ini akan mempengaruhi pola interaksi sosial, akses terhadap sumber daya, dan identitas wilayah.

Implikasi dari perubahan batas ini adalah:

1) Konflik Potensial:

Meskipun upaya pemerintah untuk mengurangi gesekan sosial, potensi konflik antara penduduk lokal dan pendatang tetap ada. Perbedaan budaya, tingkat pendidikan, dan akses terhadap sumber daya dapat menjadi pemicu konflik.

2) Perubahan Identitas Lokal:

Masuknya pendatang dalam jumlah besar dapat mengubah karakteristik sosial dan budaya masyarakat lokal. Identitas lokal yang sebelumnya kuat dapat terdilusi dengan masuknya budaya baru.

3) Peluang Ekonomi:

Di sisi lain, perubahan batas sosial juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Peningkatan investasi dan lapangan kerja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Tantangan dalam Integrasi:

Pemerintah perlu memikirkan strategi yang tepat untuk mengintegrasikan pendatang ke dalam masyarakat lokal. Hal ini mencakup upaya untuk membangun toleransi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan rasa memiliki terhadap wilayah.

Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah memicu peningkatan jumlah orang terlantar di Kabupaten Tabalong. Dinas Sosial setempat melaporkan adanya lonjakan kasus, terutama anak muda yang mencari jati diri dan sering meminta-minta. Selain itu, terdapat pula orang terlantar akibat gagal mencari pekerjaan atau menjadi korban penipuan. Mayoritas individu terlantar ini berasal dari luar daerah, seperti Barito Timur. Fenomena ini mengindikasikan adanya perubahan batas sosial di Kabupaten Tabalong, yaitu masuknya kelompok sosial baru yang membawa dinamika sosial yang berbeda. Jika mengacu pada perubahan batas menurut Sztompka bahwa perubahan batas sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah masuknya kelompok sosial baru ke dalam suatu wilayah. Dalam konteks Kabupaten Tabalong, kehadiran anak muda terlantar dan kelompok marginal lainnya dapat dianggap sebagai bentuk perubahan batas sosial. Implikasi dari perubahan batas ini:

1) Beban sosial: Peningkatan jumlah orang terlantar menjadi beban sosial bagi pemerintah daerah, karena membutuhkan penanganan khusus seperti penyediaan tempat penampungan dan layanan sosial.

2) Perubahan dinamika sosial: Kehadiran kelompok marginal dapat mengubah dinamika sosial di suatu wilayah, misalnya dengan meningkatkan angka kriminalitas atau masalah sosial lainnya.

3) Tantangan dalam integrasi: Pemerintah daerah perlu berupaya mengintegrasikan kelompok marginal ke dalam masyarakat, misalnya melalui program pelatihan kerja atau pembinaan sosial.

Dalam merespons peningkatan jumlah orang terlantar akibat pembangunan IKN, Dinas Sosial Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban dan pengembalian individu tersebut ke daerah asal. Selain itu, koordinasi dengan Dinas PPA juga dilakukan. Fenomena ini mengindikasikan adanya perubahan batas sosial di Kabupaten Tabalong, di mana terjadi penggabungan antara kelompok pendatang terlantar dengan masyarakat lokal, serta antar kelompok pendatang itu sendiri.

E. Perubahan Hubungan Antar SubSistem

Dalam rangka menyambut peran sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong tengah melakukan persiapan menyeluruh. Melihat potensi pasar yang besar di IKN, Dinas tersebut berupaya meningkatkan daya saing produk lokal melalui pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta

perbaikan tata kelola pemasaran. Kerja sama dengan Dinas Pertanian juga dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama komoditas hortikultura, guna memenuhi kebutuhan IKN. Upaya transformasi digital juga digalakkan untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah produk. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan, Kabupaten Tabalong memiliki potensi besar untuk menjadi pemasok utama produk pertanian bagi IKN. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti:

- 1) Kualitas SDM: Perlu terus dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang pertanian dan pemasaran.
- 2) Infrastruktur: Perlu adanya perbaikan infrastruktur pendukung, seperti jalan, irigasi, dan penyimpanan, untuk menunjang kegiatan produksi dan distribusi.
- 3) Akses Pasar: Pemerintah perlu memfasilitasi akses petani ke pasar, baik pasar lokal maupun nasional.

Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Tabalong mempunyai komitmen yang kuat untuk memanfaatkan peluang yang muncul akibat pembangunan IKN. Dengan perencanaan yang matang dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan Tabalong dapat menjadi contoh sukses dalam pengembangan daerah berbasis sumber daya lokal.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mendorong terjadinya perubahan signifikan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Salah satu perubahan yang tampak adalah transformasi sistem pemasaran hasil pertanian. Dengan adanya Pasar Agribisnis Kembang Kuning dan pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), petani kini memiliki akses pasar yang lebih luas dan stabil. Selain itu, IKN juga memicu peningkatan kerjasama antar instansi di Tabalong, seperti antara Dinas Koperasi dan Dinas Pertanian. Untuk mendukung pembangunan daerah sebagai penyangga IKN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Tabalong juga aktif menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan kedinasan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten dalam menghadapi era digitalisasi dan tantangan pembangunan daerah.

Perubahan-perubahan yang terjadi di Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa pembangunan IKN memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan kelembagaan. Untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang muncul, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dan merujuk pada perubahan hubungan antar subsistem menurut Sztompka, bahwa perubahan hubungan antar subsistem merujuk pada transformasi dalam interaksi antara berbagai komponen dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks pembangunan, perubahan ini seringkali dipicu oleh adanya perubahan dalam struktur sosial, ekonomi, atau politik. Pembangunan IKN telah memicu sejumlah perubahan signifikan dalam hubungan antar subsistem di Kabupaten Tabalong, antara lain:

- 1) Perubahan Hubungan antara Petani dan Pasar:
 - a. Sebelum IKN: Petani cenderung menjual hasil panennya kepada pengepul dengan harga yang ditentukan oleh pasar lokal.
 - b. Setelah IKN: Adanya Pasar Agribisnis Kembang Kuning dan Bumdesma memberikan petani akses langsung ke pasar yang lebih luas, memungkinkan mereka mendapatkan harga yang lebih baik dan memiliki lebih banyak kendali atas pemasaran produk mereka.
- 2) Perubahan Hubungan Antar Instansi Pemerintah:
 - a. Peningkatan Koordinasi: Pembangunan IKN mendorong berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Tabalong untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama, seperti antara Dinas Koperasi dan Dinas Pertanian.

- b. Fokus pada Pembangunan: Instansi pemerintah lebih fokus pada upaya mendukung pembangunan daerah, terutama dalam hal meningkatkan produktivitas pertanian dan kualitas SDM.
- 3) Perubahan Hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat:
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Pembangunan IKN mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pembangunan, seperti melalui program Kampung Hortikultura.
 - b. Peningkatan Transparansi: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya untuk membangun kepercayaan masyarakat.
- 4) Perubahan Hubungan antara Daerah dan Pusat:
 - a. Peningkatan Dependensi: Kabupaten Tabalong menjadi lebih bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pendanaan dan kebijakan pembangunan.
 - b. Peningkatan Otonomi: Di sisi lain, Kabupaten Tabalong juga diberikan lebih banyak otonomi dalam mengelola sumber daya lokal dan mengembangkan potensi daerah.
- 5) Implikasi dari Perubahan Hubungan Antar Subsistem
 - a. Perubahan hubungan antar subsistem dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.
 - b. Perubahan ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan, akses terhadap layanan publik, dan kesempatan kerja.
 - c. Perubahan yang cepat dapat menimbulkan tantangan bagi masyarakat dan pemerintah dalam beradaptasi dengan kondisi yang baru.

F. Perubahan Lingkungan Masyarakat

Kabupaten Tabalong, dengan potensi besarnya dan posisi strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), tengah mengalami transformasi signifikan. Fokus pengembangan saat ini adalah pada sektor pariwisata, agrowisata, dan industri pengolahan pangan. Untuk mendukung pertumbuhan ini, pemerintah daerah tengah mempercepat pembangunan infrastruktur dan memberikan kemudahan perizinan. Namun, upaya pengembangan yang pesat ini berpotensi menimbulkan perubahan lingkungan yang signifikan, seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman, serta peningkatan tekanan pada sumber daya alam

Sztompka menekankan bahwa perubahan sosial selalu disertai dengan perubahan lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Tabalong, pembangunan IKN telah memicu perubahan lingkungan yang signifikan. Beberapa perubahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan teori Sztompka adalah:

- 1) Perubahan Tata Guna Lahan yaitu adanya alih fungsi lahan dan fragmentasi habitat. Terjadi pergeseran fungsi lahan dari pertanian ke industri dan permukiman. Ini merupakan perubahan yang paling jelas, di mana lahan produktif secara bertahap diubah menjadi kawasan non-produktif. Pembangunan infrastruktur dan kawasan industri akan menyebabkan fragmentasi habitat alami, mengganggu keseimbangan ekosistem.
- 2) Peningkatan Interaksi Manusia-Lingkungan.
 - a. Tekanan pada Sumber Daya Alam: Meningkatnya aktivitas manusia akan meningkatkan tekanan pada sumber daya air, tanah, dan hutan.
 - b. Pencemaran Lingkungan: Limbah industri dan domestik dapat mencemari air, tanah, dan udara.
- 3) Perubahan Nilai-nilai Lingkungan. Pembangunan ekonomi seringkali mengorbankan nilai-nilai lingkungan. Prioritas pembangunan ekonomi dapat menggeser perhatian terhadap pelestarian lingkungan.

Implikasi bagi Kabupaten Tabalong

Perubahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tabalong memiliki implikasi yang luas, baik positif maupun negatif. Positifnya adalah

- a. Pertumbuhan ekonomi: Pembangunan industri dan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja.
- b. Peningkatan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

Negatifnya adalah:

- a. Kerusakan lingkungan: Alih fungsi lahan, pencemaran, dan kerusakan ekosistem dapat mengancam keberlanjutan lingkungan.
- b. Konflik sosial: Pertentangan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat memicu konflik sosial.
- c. Perubahan iklim mikro: Perubahan tata guna lahan dapat mengubah iklim mikro suatu wilayah, berdampak pada pertanian dan kehidupan masyarakat.

Faktor Pendorong Perubahan Sosial Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memiliki potensi untuk membawa perubahan sosial yang signifikan, tidak hanya di wilayah inti IKN, tetapi juga di daerah-daerah sekitarnya, termasuk Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Berikut adalah beberapa faktor pendorong perubahan sosial yang timbul akibat pembangunan IKN di Kabupaten Tabalong:

1) Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur:

Pembangunan IKN mendorong peningkatan infrastruktur transportasi, seperti jalan, bandara, dan pelabuhan, yang akan meningkatkan konektivitas antara Tabalong dan wilayah lain di Kalimantan, termasuk IKN. Peningkatan aksesibilitas ini dapat mempermudah mobilitas penduduk, barang, dan jasa, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Tabalong.

2) Pertumbuhan Ekonomi dan Peluang Kerja:

Pembangunan IKN diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, seperti konstruksi, jasa, dan pariwisata. Hal ini dapat mendorong perpindahan penduduk dari daerah lain ke Tabalong untuk mencari peluang kerja, yang dapat mengubah struktur demografi dan sosial masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Tabalong juga berkeyakinan, dengan adanya kebijakan pengembangan sektor industri, implementasinya melalui pembangunan kawasan industri, pemerintah Kabupaten Tabalong berkeyakinan pembangunan tersebut dapat menjadi stimulus bagi perkembangan sektor ekonomi lainnya dan pembangunan wilayah.

3) Perubahan Sosial Budaya:

Masuknya penduduk dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang berbeda dapat memicu perubahan sosial budaya di Tabalong. Hal ini dapat memengaruhi nilai-nilai, norma, dan tradisi masyarakat setempat, serta menciptakan dinamika baru dalam interaksi sosial. Pemindahan Ibu Kota Negara membawa pengaruh sosial budaya, yaitu: perubahan sosial budaya yang terjadi sangat cepat, potensi konflik pendatang dan penduduk setempat, perpindahan penduduk ke daerah sekitar yang menuntut penanganan sosial tertentu, serta harus membentuk budaya baru dengan konsep dan tata ruang dan manajemen perkotaan modern.

- 4) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan:
Pembangunan IKN dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah sekitarnya, termasuk Tabalong. Hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat setempat.
- 5) Dampak Lingkungan:
Pembangunan IKN juga dapat menimbulkan dampak lingkungan, seperti perubahan tata guna lahan, peningkatan polusi, dan gangguan terhadap ekosistem. Dampak lingkungan ini dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat Tabalong dan memicu perubahan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam.
- 6) Penting untuk digarisbawahi bahwa dampak pembangunan IKN terhadap perubahan sosial di Tabalong bersifat kompleks dan beragam, bergantung pada berbagai faktor, seperti: 1) Kebijakan pemerintah dalam mengelola pembangunan IKN; 2) Kesiapan masyarakat Tabalong dalam beradaptasi dengan perubahan; dan 3) Dinamika interaksi antara penduduk lokal dan pendatang.

Implikasi Pembangunan IKN bagi Kabupaten Tabalong dimana pembangunan IKN membawa perubahan besar bagi Kabupaten Tabalong, memengaruhi demografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti:

- a. Peningkatan Penduduk: Banyak migran datang, menekan kebutuhan perumahan dan infrastruktur, serta memicu persaingan kerja. Ini juga bisa menyebabkan pengangguran lokal dan masalah pangan jika tidak diatasi.
- b. Transformasi Ekonomi dan Sosial: Ekonomi bergeser ke industri dan jasa, membuka peluang tapi juga potensi kesenjangan. Peran gender bisa berubah, dan interaksi dengan pendatang akan mengubah budaya lokal.
- c. Pergeseran Fungsi: Lahan pertanian berubah jadi komersial, pasar meluas ke regional (IKN), dan pemerintah lebih aktif memfasilitasi pembangunan, bukan cuma mengatur. Ini meningkatkan kesejahteraan tapi juga membuat Tabalong bergantung pada IKN.
- d. Dinamika Batas Sosial: Masyarakat menjadi lebih beragam dengan masuknya pendatang, memunculkan tantangan integrasi dan potensi konflik. Ada upaya pemerintah untuk menyamakan peluang kerja, namun juga muncul masalah sosial seperti orang terlantar.
- e. Perubahan Lingkungan: Pembangunan cepat berisiko merusak lingkungan (alih fungsi lahan, polusi) dan memicu konflik antara pembangunan dan pelestarian.
Singkatnya, Tabalong menghadapi peluang besar untuk maju sebagai penyangga IKN, namun juga tantangan serius dalam mengelola perubahan cepat agar pertumbuhan yang terjadi seimbang dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Perubahan Sosial Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

Kondisi masyarakat yang terbuka dan adanya kesadaran untuk maju dengan memanfaatkan kehadiran IKN menjadi pendukung terjadinya perubahan sosial di Kabupaten Tabalong, sementara yang menjadi penghambat terjadinya perubahan sosial adalah:

- 1) Kualitas SDM sehingga perlu terus dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang pertanian dan pemasaran.
- 2) Infrastruktur sehingga perlu adanya perbaikan infrastruktur pendukung, seperti jalan, irigasi, dan penyimpanan, untuk menunjang kegiatan produksi dan distribusi.

- 3) Akses pasar dimana peran pemerintah dalam memfasilitasi akses petani ke pasar, baik pasar lokal maupun nasional

SIMPULAN

Dampak perubahan sosial pasca pembangunan IKN di Kabupaten Tabalong berdasarkan teori Sztompka menunjukkan bahwa pembangunan IKN telah memicu enam jenis perubahan sosial utama di Tabalong di antaranya:

- a. Perubahan komposisi penduduk yakni peningkatan migrasi penduduk dari Jawa menyebabkan lonjakan populasi, persaingan kerja, dan perubahan budaya.
- b. Perubahan struktur sosial yakni terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke industri/jasa, perubahan peran gender, munculnya kelas menengah baru, dan peningkatan partisipasi politik.
- c. Perubahan fungsi sosial yakni sektor pertanian bertransformasi dari subsisten menjadi komersial, didukung pasar agribisnis modern.
- d. Perubahan batas yakni terjadi penggabungan kelompok sosial, perubahan kriteria keanggotaan, dan penyesuaian tata ruang wilayah.
- e. Perubahan hubungan antar subsistem yakni meningkatnya kerja sama antar instansi pemerintah, serta perubahan hubungan antara petani dengan pasar, dan pemerintah dengan masyarakat.
- f. Perubahan lingkungan yakni alih fungsi lahan, fragmentasi habitat, peningkatan tekanan pada sumber daya alam, dan pencemaran lingkungan.

Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Sosial dampak Pembangunan IKN adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendorongnya adalah: Potensi sumber daya alam yang besar, letak geografis yang strategis dekat IKN, keterbukaan masyarakat, dan tingginya investasi yang masuk. Ini didukung oleh peningkatan aksesibilitas/infrastruktur, pertumbuhan ekonomi/pekerjaan, perubahan sosial budaya, peningkatan kualitas pendidikan/kesehatan, dan dampak lingkungan yang memicu adaptasi.
- b. Faktor Penghambatnya adalah: Keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, dan akses pasar yang belum optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor IPDN dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengkajian IPDN yang telah memfasilitasi penyelenggaraan penelitian serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang dengan terbuka memberikan data dan informasi terkait penelitian yang dilaksanakan. Tidak lupa teman-teman seperjuangan yang telah bekerja sama dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitian

REFERENSI

- B, Jauchar dkk 2022, The Impact of IKN on Socio-Economic Development in Penajem Paser Utara (PPU) and Kutai Kartanegara, *Journal of Governance and Public Policy*, Vol.9 No.2 E-ISSN : 2549-7669 P-ISSN: 2355-8695, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta MIP, <https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/14083>
- Chandra Adjie Prianggodo. 2017. *Pembangunan IKN Sebagai Mercusuar Strategis (Kajian Kritis Dalam Perspektif Sustainable Development)*
- Fadillah, Nor, 2022, Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), *SUPREMASI HUKUM Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 11 No.1 e-ISSN 2723-4207 p-ISSN 2302-1128 <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559> <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2559>
- Firnaherera, Vice Admira & Adi Lazuardi, 2022, Pembangunan Ibu Kota Nusantara Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat, *JSKP Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1 (1), 71-84 ISSN Elektronik: 2985-4997 <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jskp/issue/view/63> DOI: <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84>
- Mahyudin. 2022. <https://www.kompas.tv/article/259654/dpd-ri-sebut-uu-ikn-belum-sentuh-wilayah-penyangga-banyak-potensi-permasalahan-belum-diatur>
- Prianggodo, Chandra Adjie, 2023, Pembangunan Ikn Sebagai Mercusuar Strategis (Kajian Kritis Dalam Perspektif Sustainable Development), *Jurnal Pemerintahan dan Politik Universitas Indoglobal Mandiri*, Vol. 8 No. 1 Sinta 4 <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/2898> <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2898>
- Puspitaningrum, Sandy Ratna, 2023, Pemindahan Ibu Kota Negara: Pembangunan Kota Inklusif dan Berkelanjutan, *Resolusi Jurnal Sosial Politik*, Vol.6 No. 2 EISSN 2621-5764 <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/6096> <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.6096>
- Putri, Aulia Safira, Mei Indrawati, Rusdiyanto Rusdiyanto, 2024, Analisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Terhadap Potensi Pertumbuhan Investasi Domestik Dan Asing, *Relawan Jurnal Indonesia*, Vol.3 No. 5 Juli 2024 <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.3877> <https://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/issue/view/102>
- Restu Adi Putra, Irham Rahman, Gentur Cahyo Setiono, 2023, Kesesuaian Keperuntukan Tanah Dalam Pembangunan Ibukota Baru Nusantara Ditinjau Dari Dampak Lingkungan, *Jurnal Transparansi Hukum* P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
- Ripaldi, dkk, 2022, Kesiapan Dayak Deah Di Desa Kinarum Dalam Menyambut Ibu Kota Negara Baru, STP : *Jurnal Teknologi Pabelum*, Vol.2 No.1 ISSN 2829-0550 (e) ISSN 2088-8767 (p) Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis (UPI STT GKE) <https://jurnal.stt-gke.ac.id/index.php/pabelumjtp/article/view/27> <https://doi.org/10.59002/jtp.v2i2.27>
- Sembiring, Surinta B, 2022, Analisis Dinamika Sosio-Demografi Sebagai Acuan untuk Mewujudkan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang Smart, Green, Beautiful dan Sustainable, *ECONOMIC*

DEVELOPMENT AND GROWTH, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas ISBN : 2620 ISSN : 2613
Vol.V No.1/ Maret 2022 <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.122>

Sztompka, Piotr. 2017. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana

Wulandari , Dyah Sri, A.Firsa Ariza dan , Nurhayati, 2023, Pengaruh Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Investasi di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, *Journal on Education* Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2023, pp. 3804-3807 E-ISSN: 2654-5497, P-ISSN: 2655-1365 Website: <http://jonedu.org/index.php/joe>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur

<https://suaradewata.com/berita/202303170023/pembangunan-ikn-mengurangi-pengangguran-di-indonesia> _Februari 2022,11:57 WIB